

## **BAB V PENUTUP**

### **V.I Kesimpulan**

Kesehatan merupakan interaksi kompleks antara faktor sosial ekonomi yang berkaitan dengan lingkungan. Kesehatan global merupakan pemerataan kesehatan bagi seluruh masyarakat di dunia dengan menekankan masalah transnasional pada pencegahan penyakit. Fenomena pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini memiliki dampak besar terhadap kelangsungan hidup manusia dengan kiris kesehatan. Seluruh sektor kehidupan terkena dampak akibat pembatasan hubungan sosial dan ekonomi masyarakat.

Wabah SARS tahun 2003 membawa perkembangan terhadap isu kesehatan. Ancaman global terus berdatangan dengan adanya wabah Flu Burung (H5N1), Flu Babi (H1N1), MERS, Ebola, dan Zika. Perkembangan keilmuan kesehatan semakin berkembang untuk dapat menghadapi masalah yang terjadi. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan terhadap hidup masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan hal dasar yang harus dipenuhi pemerintah untuk memberikan hak bagi masyarakat.

Fenomena transnasionalisme menyebabkan minimnya kontrol negara dalam kehidupan dan meningkatkan resiko terhadap penyebaran penyakit menular. Negara harus mengambil langkah untuk melindungi warganya dengan melibatkan peran negara lain agar regulasi yang ditetapkan saling terkait untuk menjaga keamanan wilayah.

WHO menjalankan peran sebagai badan internasional untuk menanggulangi permasalahan penyakit dan ancaman transnasional lainnya. Untuk melaksanakan hal tersebut, WHO melakukan kerjasama dengan berbagai aktor untuk mewujudkan kesetaraan kebijakan.

Indonesia aktif terlibat dalam forum internasional dan multilateral seperti WHA, GHSA, FPGH, OKI, dan ASEAN untuk mendukung upaya pembangunan nasional yang menyangkut area kerja kesehatan. Fokus kebijakan luar negeri Indonesia pada 2010-2014 adalah meningkatkan peran diplomasi di tingkat multilateral dengan menggagas konsep *access and benefit sharing*.

Foreign Policy and Global Health Initiatives merupakan forum multilateral yang secara resmi membawa isu kesehatan global dalam kebijakan luar negeri. Hal ini didasar oleh kurangnya kesadaran dunia akan kepentingan kesehatan. FPGH memperkuat komitmen bersama atas isu kesehatan dengan meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan global melalui kaca mata politik luar negeri.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota FPGH berkesempatan menjadi ketua di tahun 2020 dengan menggagas tema *Affordable Healthcare for All* karena masih banyak kasus di dunia dengan memperlihatkan kesenjangan akses kesehatan yang membuat masyarakat hidup dalam kerentanan. Keunggulan forum ini diantara forum lainnya adalah menjadi forum yang mendeklarasi urgensi kesehatan global dalam ranah politik internasional. Tema yang digagas setiap tahunnya akan menjadi perhatian dan isu pembahasan di ranah sidang dan pertemuan setingkat PBB dan WHO. Alih kuasa jabatan dari Perancis ke Indonesia bertepatan dengan fenomena pandemi Covid-19. Kondisi tersebut akan memfasilitasi upaya diplomasi kesehatan Indonesia untuk menciptakan keamanan kesehatan dalam menanggulangi dampak pandemi.

Penanganan pandemi sebagai fenomena global membutuhkan kolaborasi dari seluruh aktor di berbagai sektor untuk merespon ancaman yang ada. Permasalahan pada isu kesehatan ini berkaitan dengan sektor sosial dan ekonomi serta kondisi keamanan negara. Berbagai forum dilaksanakan secara khusus untuk membahas penanganan pandemi. WHO berperan sebagai koordinator pengembangan penelitian dan sumber informasi terpusat dalam merespon Covid-19. Kerjasama multilateral dapat dimanfaatkan sebagai langkah gotong royong dalam usaha percepatan penanganan pandemi.

FPGH sebagai forum multilateral memiliki kepentingan pada isu kesehatan global. Dalam setiap pertemuan yang diadakan pada skala internasional berperan sebagai pemimpin sidang yang memonitor jalannya persidangan dan menjalankan tujuannya untuk mempromosikan kesehatan global dalam dunia internasional. Melalui tiga agenda besarnya, FPGH berupaya untuk memperkuat sistem kesehatan melalui kerjasama internasional untuk menjamin ketidakadilan sosial di masyarakat. Sistem kesehatan meliputi pelayanan kesehatan, akses kesehatan, dan pembiayaan kesehatan.

Keketuaan Indonesia pada tahun 2020 menyoroti kerjasama multilateral dengan menjadikan akses terhadap obat-obatan, vaksin, dan pelayanan kesehatan sebagai prioritas kerja. Komitmen ini dijalankan untuk memperkuat kesiapsiagaan global dan ketahanan sistem kesehatan nasional dalam mencapai target SDGs dan UHC. Sidang *Executive Board* WHO ke-146 secara khusus diselenggarakan untuk menghadapi situasi darurat kesehatan global Covid-19. Negara-negara anggota FPGH memberikan dukungan terhadap WHO dalam merespon pandemi. Indonesia mengarahkan kepada seluruh negara untuk dapat meningkatkan kolaborasi dan memberikan bantuan antar negara dalam mengimplementasikan IHR. Pertemuan virtual Menteri Kesehatan FPGH menekankan kontribusi positif seluruh negara dalam memerangi situasi *Public Health Emergency of International Concern*.

Menurut penulis, keterlibatan FPGH sebagai inisiator tema kajian yang diangkat dalam forum internasional telah mencapai target utamanya untuk membawa isu kesehatan dalam konstelasi politik dunia melalui diplomasi kesehatan. Usaha untuk memerangi pandemi Covid-19 melalui kolaborasi nyata merupakan wadah negara-negara anggotanya untuk menjalankan diplomasi kesehatan dan menunjukkan eksistensinya dalam dunia internasional. Peran Indonesia sebagai ketua dalam beberapa sidang bertujuan untuk menjalankan politik luar negeri Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dalam menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia melalui keamanan kesehatan.

FPGH dalam perkembangannya telah memiliki beberapa capaian pada tahun 2020. Berdasarkan hasil analisis penulis, dalam mewujudkan Affordable Healthcare

for All, Indonesia melalui FPGH telah menangani pandemi Covid-19 melalui keterlibatan berbagai aktor, seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, industri farmasi, hingga kelompok masyarakat. Upaya mewujudkan sistem kesehatan yang terjangkau ditunjukkan melalui keterlibatan BPJS Kesehatan sebagai lembaga terkait jaminan kesehatan nasional dengan memperkenalkan program Kartu Indonesia Sehat serta membahas langkah alternatif dalam permasalahan asuransi kesehatan di masa mendatang.

Analisis selanjutnya, penulis melihat bahwa akses vaksin dan obat-obatan telah dikawal secara penuh oleh PBB dengan melibatkan kerangka kerja COVAX Facility yang menjamin distribusi vaksin global secara adil dan berdasarkan skala prioritas. Hal tersebut telah diimplementasi melalui kerjasama hubungan bilateral maupun regional untuk membantu negara yang membutuhkan. Keterlibatan perusahaan vaksin merupakan hal penting dalam menyelenggarakan keamanan kesehatan dalam penyediaan stok vaksin global.

Upaya diplomasi kesehatan yang dilakukan Indonesia dan FPGH dalam menanggulangi pandemi dan menghasilkan beberapa kerangka kerjasama yang tidak hanya terbatas pada hubungan multilateral, melainkan hubungan bilateral juga tercipta kerjasama seperti Indonesia-China dalam mengembangkan vaksin Sinovac serta kerjasama kawasan seperti ASEAN untuk menjaga stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara.

Dalam analisa penulis, keketuaan Indonesia pada periode sebelumnya di tahun 2013 masih menjadi titik tertinggi kesuksesan Indonesia dalam menjalankan diplomasi kesehatan. Draft resolusi yang digaungkan sejak 2007 dengan pengesahan resolusi global pada Sidang Majelis Umum PBB ke-68. Kerangka acuan kerja mekanisme *access and benefit sharing* tersebut diadopsi oleh negara-negara anggota WHO untuk dapat diterapkan di masing-masing negara.

Penulis mengadaptasi metode perumusan strategi oleh Lykke dengan rumusan "*Strategy = Ends+Ways+Means*" dalam kebijakan keamanan kesehatan untuk

menganalisis keputusan yang dijalankan oleh Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19. Pertama, keketuaan Indonesia pada FPGH memiliki tujuan untuk menciptakan sistem kesehatan yang terjangkau dan memberikan keadilan terhadap akses pelayanan kesehatan, khususnya pada masa pandemi. Kedua, cara yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut dengan melakukan promosi kesehatan global melalui FPGH dan menekankan kerjasama multilateral yang dapat melibatkan aktor multi sektor. Ketiga, memanfaatkan sumber daya yang ada merupakan langkah utama dalam mencapai tujuan. Contohnya seperti menjalin kerjasama dengan produsen di bidang kesehatan untuk memastikan ketersediaan alat kesehatan, obat-obatan, dan vaksin untuk dapat diterima manfaatnya oleh masyarakat.

## **V.2 Saran**

Setelah data-data terkumpul dan dianalisis, penulis memahami bahwa pelaksanaan diplomasi kesehatan Indonesia melalui FPGH tidak terlepas dari adanya hambatan. Data-data yang diperoleh, secara garis besar telah memberikan citra positif Indonesia dalam langkah diplomasi kesehatan global. Namun, diperlukan keserasian dalam menjalankan kebijakan luar negeri dengan kebijakan dalam negeri. Kebijakan dalam negeri yang menetapkan PSBB merupakan hal yang cukup bertentangan dengan arahan “*lockdown*” oleh WHO. Walaupun kebijakan tersebut telah melalui berbagai proses dan pertimbangan, akan dapat dilihat oleh dunia internasional bahwa Indonesia tidak secara penuh mendukung upaya percepatan penanganan pandemi. Oleh karena itu, keserasian politik luar negeri dan politik dalam negeri merupakan hal esensial untuk memberikan citra positif. Kementerian Luar Negeri sebagai pelaku utama diplomasi Indonesia di kancah internasional menyusun kerangka kerja berdasarkan visi dan misi presiden dan wakil presiden serta prioritasnya agar dapat berjalan optimal.